

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam BAB ini akan dijelaskan tentang realisasi kondisi ekonomi tahun 2013, perkiraan tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015. Selain itu juga akan dijelaskan realisasi tahun 2013, perkiraan tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terangkum dalam skema kebijakan keuangan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan DKI Jakarta diatas pertumbuhan nasional, dengan focus pada proporsi PDRB sector konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, real estate dan jasa keuangan serta sektor jasa-jasa atas dasar harga berlaku mencapai lebih dari 73 persen. sementara untuk inflasi tidak terlalu jauh dari inflasi nasional tetap dibawah dua digit.

3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun 2013 sebesar 6,11 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada tingkat nasional pada periode yang sama yakni sebesar 5,78 persen. Namun demikian angka ini masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Jakarta yang dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 6,53 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2013 bila dibandingkan dengan yang dicapai tahun 2012 disebabkan masih belum stabilnya perekonomian global yang kemudian mengurangi permintaan produk DKI Jakarta (ekspor). Sebagai dampak melambatnya kegiatan di sektor produksi berimbas pada melambatnya konsumsi rumah tangga.

Secara kumulatif, PDRB DKI Jakarta tahun 2013 tumbuh sebesar 6,5 persen sedikit lebih lambat dibandingkan dengan 2011. Berdasarkan harga konstan PDRB DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp.477,3 Triliun, meningkat Rp.27,5 Triliun dibanding tahun 2012 sebesar Rp.449,8 Triliun. Sementara PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp.1.225,9 Triliun meningkat Rp.122,24 Triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp.1.103,69 Triliun.

Sebutan Jakarta sebagai kota jasa (service city) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) dimana sekitar 72,2 persen PDRB DKI Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 27,3 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya 0,5 persen dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Dari sisi permintaan, tidak semua komponen mengalami pertumbuhan positif. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga mengalami kenaikan dari 56,9 persen pada tahun 2012 menjadi 57,6 persen di tahun 2013, Konsumsi Pemerintah juga meningkat kontribusinya dari 9,6 persen pada tahun 2012 menjadi 9,8 persen pada tahun 2013. Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Stok mengalami penurunan kontribusinya dari 38,7 persen pada tahun 2012 menjadi 37,8

persen pada tahun 2013. Komponen ekspor juga mengalami penurunan kontribusi dari 56,2 persen pada tahun 2012 menjadi 54,6 persen tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada komponen impor dimana mengalami penurunan kontribusi dari 61,4 persen pada tahun 2012 menjadi 59,7 persen pada tahun 2013.

Perbaikan perekonomian Jakarta terutama bersumber dari peningkatan konsumsi. Dari sisi sektoral, perekonomian Jakarta terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didukung terutama oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 10,8 persen. Persentase sektor tersebut menurun 1,0 persen dibanding tahun 2012 sebesar 11,8 persen. Sektor lain yang perannya cukup besar yaitu sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 7,5 persen dengan meskipun persentase sektor tersebut sedikit lebih rendah dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 7,6 persen. Selain itu sektor lain yang juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 6,4 persen; sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 5,7 persen.

Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi bersumber dari peningkatan aktivitas terkait Pemilu yang menyebabkan penggunaan alat telekomunikasi (termasuk pulsa) meningkat serta dibukanya Bandara Halim Perdanakusuma. Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kinerja industri manufaktur (khususnya industri besar dan sedang) yang tumbuh 8,40% (yoy). Pertumbuhan terutama terjadi pada industri alat angkutan dan industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer.

Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan potensi terjadi perlambatan. Proyeksi tersebut diperkuat dengan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan baku dan penolong. Kondisi ini semakin diperberat dengan nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan pada triwulan I/2014. Pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan sedikit menurun menjadi 6,0-6,4 persen dari proyeksi semula dalam penetapan APBD 2013 sebesar 6,1-6,5 persen.

B. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2013 adalah sebesar 8,00%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yaitu 4,52%. Penyebabnya utama inflasi DKI Jakarta melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli

2013. Namun demikian, inflasi DKI Jakarta tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38%.

Perkembangan inflasi DKI Jakarta tahun 2013 menunjukkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi dan bahan makanan sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Untuk Tahun 2014, inflasi nasional diproyeksikan akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah menjadi 5,5 persen. Sementara inflasi untuk DKI Jakarta semula dalam penetapan APBD 2014 sebesar 5,0 - 6,0 persen diproyeksikan meningkat menjadi 5,5 – 6,5 persen.

C. Nilai tukar

Kondisi perekonomian global mempengaruhi secara signifikan perekonomian nasional dan DKI Jakarta. Aksi The Fed yang menghentikan kebijakan quantitative easing sebagai stimulus ekonomi Amerika Serikat dinilai banyak kalangan sebagai penyebab utama turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Hal tersebut tercermin dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2013 dengan nilai tengah mencapai Rp.10.452 per Dollar Amerika. Sedangkan pada tahun 2014, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika kembali melemah hingga mencapai sebesar Rp.11.500 sampai Rp.12.000 per Dollar Amerika.

Memperhatikan kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2015 diperkirakan berada di kisaran Rp 11.500-12.000 per Dolar AS.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Perekonomian DKI Jakarta juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014, maka prospek perekonomian tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.

Ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2015 diproyeksikan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2014 yang diproyeksikan pada kisaran 5,9 – 6,3 persen. Hal ini didorong oleh perbaikan perekonomian global yang meningkatkan kembali kinerja ekspor, peningkatan konsumsi karena membaiknya daya beli masyarakat serta perkiraan peningkatan permintaan domestik karena imbas pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian perekonomian diharapkan tumbuh pada angka 5,9 – 6,4 persen.

B. Inflasi

Inflasi tahun 2015 diperkirakan akan terjaga pada angka 5,0 – 6,0 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,5 – 6,5 persen. Kondisi tersebut terjadi dengan asumsi nilai tukar yang stabil dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga.

C. Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.11.500 sampai Rp.12.500 pada tahun 2015, atau sesuai dengan proyeksi tahun 2014 yang diperkirakan akan berada pada kisaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka secara ringkas, ketiga indikator utama tersebut dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut.

Tabel 3.1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika

No.	VARIABEL	APBD 2013	APBD-P 2013	APBD 2014	APBD-P 2014	APBD 2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	DKI	6,8 – 7,0	6,0 - 6,4	6,1 – 6,5	5,9 – 6,3	5,9 – 6,4
	Nasional	6,8	5,9	6,0	5,8 – 6,0	5,5 – 6,3
2.	Inflasi (%)					
	DKI	5,0 – 6,0	9,0 - 10,0	5,0 - 6,0	5,5 – 6,5	5,0 – 6,0
	Nasional	4,9	9,2	5,5	5,4 – 5,7	3,0 – 5,0
3.	Nilai tukar (Rupiah per Dollar Amerika)					
	DKI/Nasional	9.300	10.200	10.500		11.500 – 12.500

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Beberapa asumsi lainnya yang direncanakan akan dicapai tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Sosial Tahun 2011-2015

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB-Harga Berlaku	Triliun Rupiah	982,52	1.103,74	1.255,93	1.485,00	1.597,17
2.	PDRB-Harga Konstan 2000	Triliun Rupiah	422,24	499,82	477,29	505,42	538,74
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,73	6,53	6,11	7,00	6,3
4.	Tingkat Inflasi	%	3,97	4,52	5,0-6,0	5,5-6,0	6,5
5.	Struktur Ekonomi Menurut Sektoral						
	a. Pertanian	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	b. Pertambangan	%	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
	c. Industri Pengolahan	%	15,6	15,6	15,4	15,5	15,2
	d. Listrik, Gas, dan Air Bersih	%	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0
	e. Konstruksi	%	11,5	11,4	11,3	11,3	11,0
	f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	%	20,8	20,7	20,7	20,8	21,0
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	%	10,3	10,3	10,4	10,3	10,7

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2011	2012	2013	2014	2015
	h. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	%	27,6	27,7	28,1	27,8	27,9
	i. Jasa-jasa	%	12,6	12,8	12,8	12,7	12,7
6.	Produktivitas Sektoral						
	a. Pertanian	Juta Rupiah	32,42	37,98	35,68	34,85	35,01
	b. Pertambangan	Juta Rupiah	289,73	437,20	378,21	376,68	375,1
	c. Industri Pengolahan	Juta Rupiah	195,71	243,85	213,74	258,91	258,6
	d. Listrik, Gas, dan Air Bersih	Juta Rupiah	725,5	966,53	918,92	968,23	968,1
	e. Konstruksi	Juta Rupiah	522,46	767,11	798,14	785,12	781,5
	f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Juta Rupiah	110,6	142,91	147,98	153,78	150,9
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rupiah	215,27	279,72	258,93	272,45	275,8
	h. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	791,05	1.054,68	999,72	978,89	998,6
	i. Jasa-jasa	Juta Rupiah	104,61	97,76	101,62	102,65	103,4
7.	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran						
	a. Konsumsi Rumah Tangga	%	57,0	56,9	57,4	57,2	57,7
	b. Konsumsi Pemerintah	%	9,9	9,6	9,5	9,9	9,6
	c. Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,2	38,7	38,1	37,9	37,8
	d. Ekspor	%	55,1	56,2	54,9	55,2	54,5
	e. Impor	%	60,1	61,4	59,9	60,2	59,6
8.	ICOR		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
9.	Jumlah Wisman	Juta Orang	2,00	2,13	2,21	2,45	2,5
10.	Ekspor						
	a. Melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	Juta \$AS	46.476	48.136	47.172	48.529	48.459
	b. Produk asal DKI Jakarta	Juta \$AS	11.042	11.806	11.564	12.372	12.078
11.	Impor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	Juta \$AS	88.874	96.885	93.857,2	99.979,8	99.031
12.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	363,4	363,2	354,19	351,18	348,3
13.	Persentase Jumlah	%	3,75	3,69	3,55	3,47	3,4

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2011	2012	2013	2014	2015
	Penduduk Miskin						
14.	Jumlah Angkatan Kerja	Juta Orang	5,14	5,37	5,16(feb)	5,21	5,3
15.	Jumlah Penduduk Bekerja	Juta Orang	4,59	4,84	4,65 (feb)	4,71	4,7
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,80	9,87	9,94 (feb)	9,82	9,9
17.	PDRB per Kapita-Harga Berlaku	Juta Rupiah	100,98	110,46	138,27	144,17	156,89
18.	Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta	Triliun Rupiah	10,5	10,9	11,3	11,9	12,3
19.	Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	%	3,1	2,2	2,7	2,6	2,8
20.	Jumlah Penduduk	Juta Orang	9,89	9,99	10,1	10,2	10,18
21.	Kepadatan Penduduk	Penduduk /km ²	14.690	15.085	15.236	15.402	15.371
22.	Indeks Pembangunan Manusia		77,97	78,33	78,7	79,1	82,3
23.	Angka Kelahiran Total (TFR)	Per Wanita Kawin	1,50	1,52	1,51	1,50	1,50
24.	Angka Kematian Bayi (IMR)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	6,9	6,9	6,7	6,7	6,7
25.	Angka Harapan Hidup (e ₀)	Tahun	76,30	76,41	76,43	76,52	77,0
26.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95	10,98	11,02	11,19	11,4
27.	Angka Melek Huruf	%	98,90	99,13	99,15	99,16	99,2
28.	Angka Partisipasi Sekolah						
	a. 7-12 tahun	%	98,09	98,97	98,97	98,98	99,0
	b. 13-15 tahun	%	92,01	93,79	93,81	93,83	93,9
	c. 16-18 tahun	%	58,56	60,81	62,27	65,61	68,9
29.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB		1,45	14,97	16,00	21,88	23,36
30.	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB		1,72	18,59	18,62	26,63	27,60
31.	Rasio Dana Perimbangan Terhadap PDRB		0,87	8,85	7,43	10,28	13,36
32.	APBD	Triliun Rupiah	26,42	41,35	50,06	67,07	81,58

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah dalam hal pendanaan pembangunan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBD, tetapi juga dari APBN, pinjaman dan peran serta masyarakat dalam bentuk CSR maupun hibah. Sementara untuk pelaksanaan pembangunan tidak lagi

sepenuhnya mengandalkan SKPD tetapi sudah mulai dilimpahkan kepada PT/PD/BUMD dan juga masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sebelum menjelaskan rencana Pendapatan Daerah Tahun 2015, terlebih dahulu perlu dilihat realisasi Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2012			2013		
		Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	20.523,43	22.040,80	107,39	26.304,09	26.849,33	102,07
1.1.	Pajak daerah	16.525,00	17.721,49	107,24	22.618,00	23.367,01	103,31
1.2.	Retribusi daerah	901,22	1.820,44	202,00	500,58	333,37	66,6
1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	360,00	351,82	97,73	396,22	397,23	100,25
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	2.737,21	2.147,05	78,44	2.789,28	2.751,70	98,65
2.	Dana Perimbangan	9.776,88	11.554,96	118,19	10.547,53	9.387,53	89,0
2.1.	Dana bagi hasil pajak	9.350,00	10.984,79	117,48	10.013,08	8.863,20	88,52
2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	151,55	294,84	194,56	235,26	225,15	95,70
2.3.	Dana alokasi umum	275,33	275,33	100,00	299,18	299,18	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.349,70	1.783,41	53,24	3.948,23	3.270,32	82,83
3.1.	Hibah	1.533,14	3,73	0,24	1.760,52	1.140,84	64,80
3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.816,56	1.779,68	97,97	2.187,70	2.129,48	82,83
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		33.650,01	35.379,18	105,14	40.799,86	39.507,20	96,83

Pendapatan Daerah pada tahun 2012, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.35.379,18 Milyar, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.33.650,01 Milyar atau realisasinya mencapai 105,14%. Sementara tahun 2013, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.39.507,20 Milyar, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.40.799,86 Milyar atau realisasinya mencapai 96,83%. Secara total, Pendapatan Daerah tahun 2013 lebih tinggi 10,45% dibanding tahun 2012.

Tahun 2014 dan 2015, Pendapatan Daerah direncanakan akan meningkat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	
		Penetapan Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah	39.559,41	44.091,03
1.1.	Pajak daerah	32.500,00	37.310,00
1.2.	Retribusi daerah	1.746,41	600,00
1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	447,55	1.119,00
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	4.865,44	5.062,03
2.	Dana Perimbangan	17.770,00	21.350,00
2.1.	Dana bagi hasil pajak	17.434,00	21.000,00
2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	250,00	250,00
2.3.	Dana alokasi umum	86,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.386,13	6.071,10
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		64.715,73	71.512,14

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2014 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2014. Selain itu, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta serta dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun, diharapkan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah dengan pendapatan terbesar diperoleh dari Pajak Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2013, APBD tahun 2014, RAPBD Perubahan tahun 2014, serta realisasi pendapatan daerah sampai 30 April 2014, rencana pendapatan daerah tahun 2015 ditargetkan Pendapatan Daerah pada tahun 2015 mencapai Rp. 71,51 Triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 44,09 Triliun, Dana Perimbangan Rp. 21,35 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 6,07 Triliun. Angka Pendapatan Daerah naik 10,00 persen terhadap penetapan 2014 sebesar Rp. 6,79 Milyar.

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari sandingan realisasi dan rencana Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 berikut:

Tabel 3.5. Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Penetapan Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah	17.825,98	22.040,80	26.849,33	39.559,41	44.091,03
1.1.	Pajak daerah	15.221,25	17.721,49	23.367,01	32.500,00	37.310,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Penetapan Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.2.	Retribusi daerah	609,35	1.820,44	333,37	1.746,41	600,00
1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	278,79	351,82	397,23	447,55	1.119,00
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	1.716,60	2.147,05	2.751,70	4.865,44	5.062,03
2.	Dana Perimbangan	9.149,71	11.554,96	9.387,53	17.770,00	21.350,00
2.1.	Dana bagi hasil pajak	8.747,64	10.984,79	8.863,20	17.434,00	21.000,00
2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	192,16	294,84	225,15	250,00	250,00
2.3.	Dana alokasi umum	209,91	275,33	299,18	86,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.321,67	1.783,41	3.270,32	7.386,13	6.071,10
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		28.297,35	35.379,18	39.507,20	64.715,73	71.512,14

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah;
- b. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu;
- c. Memperluas basis pajak yang telah dilakukan sejak 2010 dengan 800 Wajib Pajak dan terus dikembangkan hingga ditargetkan 14.000 Wajib Pajak pada tahun 2017;
- d. Memberlakukan Pajak Rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Rokok merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi;
- e. Menyesuaikan sewa parkir secara periodik;
- f. Mengoptimalkan jenis retribusi baru yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- g. Meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi;
- h. Memberlakukan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor dan kenaikan tarif pajak BBN-KB;
- i. Meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu;
- j. Mengoptimalkan peningkatan pajak online

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*

3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAU.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Belanja Daerah digunakan untuk membiayai:

1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain.
2. Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI).
3. Belanja Wajib yang sifatnya mengikat.
4. Belanja Dedicated Program yaitu program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
5. Belanja Kegiatan Tahun Jamak (*multiyears*) yaitu kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD.
6. Belanja Prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan.

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
 - Menaikan gaji pokok berdasarkan gaji dan tunjangan 2014 serta acress sebesar 2,5 persen
 - Menaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
 - Membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 Persen dari belanja.
2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan belanja untuk :
 - Pembayaran Tipping Fee Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang;
 - Pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI)

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD

1. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's* dan *MP3EI*) serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.

5. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
6. Mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD.
7. Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek antara lain meliputi: pembebasan lahan Waduk, pengelolaan sampah dan pengamanan ketersediaan pangan.
8. Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara antara lain meliputi :
 - Pengembangan Transportasi.
 - Penanganan Banjir.
 - Pengembangan Perumahan Rakyat.
 - Penataan Air Bersih dan Air Limbah.
 - Penyediaan Energi.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD / UKPD;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
3. Melaksanakan efisiensi jumlah kegiatan melalui penggabungan kegiatan;
4. Mengurangi kegiatan yang bersifat non fisik dan mengurangi honorarium PNS yaitu bahwa honorarium diberikan kepada PNS yang terlibat langsung dan/atau mempengaruhi pencapaian target penyelesaian kegiatan.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas. Untuk melihat perkembangan Belanja Daerah, dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2013

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2011		2012		2013	
		Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	10.244,19	9.627,35	11.507,41	11.673,11	14.968,96	13.148,63
2.	Belanja Langsung	20.678,16	16.796,25	22.319,62	19.885,59	31.609,90	25.145,76
JUMLAH BELANJA DAERAH		30.922,35	26.423,60	33.827,03	31.558,70	46.578,86	38.294,39

Pada tahun 2014, Belanja Daerah direncanakan akan meningkat jumlahnya, begitu pula Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7. Rencana Belanja Daerah Tahun 2013-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2013	Penetapan Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Belanja Tidak Langsung	14.582,87	15.876.62	16.510,30
2.	Belanja Langsung	30.993,46	49.006.12	51.806,52
JUMLAH BELANJA DAERAH		45.576,33	64.882.74	68.316,82

Tahun 2015, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.68,31 Triliun, Rp.51.80 Triliun untuk Belanja Langsung dan Rp.16.51 Triliun untuk Belanja Tidak Langsung.

Perkembangan realisasi dan rencana Belanja Daerah dalam periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2011-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Penetapan Tahun 2013	Rencana Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Belanja Tidak Langsung	9.627,35	11.673,11	14.582,87	15.876.62	16.510,30
2.	Belanja Langsung	16.796,25	19.885,59	30.993,46	49.006.12	51.806,52
JUMLAH BELANJA DAERAH		26.423,60	31.558,70	45.576,33	64.882.74	68.316,82

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 dan Pinjaman MRT. Untuk SiLPA Tahun 2014, dengan menggunakan asumsi bahwa tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2014 dan tingkat penyerapan belanja 90 persen maka diperkirakan SiLPA Tahun 2014 akan mencapai Rp.9.000,00 Miliar, sementara untuk Pinjaman MRT yang akan dicairkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.070,99 Miliar.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 9,00 Miliar dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 13.257,32 Miliar yang dialokasikan pada :

- PT. MRT Jakarta Rp. 4,62 Triliun
- PT. Jakarta Propertindo Rp. 500 Milyar
- PD. PAL Jaya Rp. 250 Milyar
- PT. Bank DKI Rp. 3,00 Triliun
- PT. Transportasi Jakarta Rp. 2,00 Triliun
- PD Pasar Jaya Rp. 1,08 Triliun
- PT. Jakarta Tourisindo Rp. 300 Milyar
- PT. Pembangunan Jaya Ancol Rp. 1,50 Triliun

Untuk memberikan gambaran pembiayaan daerah, berikut dijabarkan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2011, 2012 dan 2013.

Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2013

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2011			2012			2013		
		Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%
1.	Sumber Penerimaan Daerah	4.911,20	4.911,20	0,00	7.703,22	6.475,55	84,06	9.463,72	9.463,72	100%
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.911,20	4.911,20	0,00	6.470,62	6.470,62	0,00	9.463,72	9.463,72	100%
1.2.	Transfer dari Dana Cadangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	1.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sumber Pengeluaran Daerah	594,00	141,11	(76,24)	2.986,55	823,30	27,87	3.684,72	3.085,72	83,74
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	0	54,03	0,00
2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah	594,00	136,78	(76,97)	2.781,68	618,48	22,23	3.626,52	2.981,36	82,21%
2.3.	Pembayaran Utang Pokok	0,00	0,00	0,00	11,23	8,17	72,75	58,19	47,92	82,36%
2.4.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	35,04	34,65	98,88	50,02	39,75	79,48%
2.5.	Pembayaran Utang TPP	0,00	0,00	0,00	105,20	57,50	54,66			
2.6.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4,32	0,43	53,40	55,44	103,82	0	2,4	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		4.317,20	4.770,09	10,49	4.716,67	5.643,25	119,64	5.779,00	6.377,99	110,36%

Berikut ini adalah rincian rencana Pembiayaan Daerah, baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah tahun 2013, 2014 dan 2015.

Tabel 3.10. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2013	Penetapan Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Sumber Penerimaan Daerah	8.454,55	7.284,40	19.070,99
2.	Sumber Pengeluaran Daerah	4.403,56	7,117,38	13.266,32
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		4.050,99	167,01	5.804,67

Perkembangan realisasi dan rencana Belanja Daerah dalam periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015

(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Rencana Tahun 2014	Rencana Tahun 2015
1.	Sumber Penerimaan Daerah	4.991,20	6.475,55	9.463,72	7.284,40	19.070,99
2.	Sumber Pengeluaran Daerah	141,11	823,30	3.684,72	7,117,38	13.266,32
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		4.770,09	5.643,25	5.779,00	167,01	5.804,67

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, dari sisi Penerimaan yaitu dengan menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan penerimaan dari Pinjaman Daerah, yaitu untuk pembiayaan Mass Rapid Transit (MRT). Dari sisi Pengeluaran, difokuskan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan pembayaran utang pokok.